PTATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB), DAN SURAT TANDA BUKTI LAPORAN KEDATANGAN KAPAL (STBLKK) OLEH SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG SULAWESI UTARA

TUGAS AKHIR

Oleh:

RAHMAWATI
1522020185

PROGRAM STUDI PENANGKAPAN IKAN
JURUSAN PENANGKAPAN IKAN
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP

2018

HALAMAN PENGESAHAN

TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DAN SURAT TANDA BUKTI LAPORAN KEDATANGAN KAPAL (STBLKK) OLEH SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG SULAWESI UTARA

TUGAS AKHIR

Oleh:

RAHMAWATI
1522020185

Tugas Akhir ini sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi pada
Program Studi Penangkapan Ikan Jurusan Penangkapan Ikan
Politeknik Pertanian Negeri Pangkep
Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Pembimbing I,

Irawan Alham, ST,. M.Si
NIP. 19781023 200312 1 004

Pembimbing II,

Syamsul Marlin Amir, ST.,M.Si
NIP. 19790507 200501 1 001

Mengetahui :

Direktur,

Dr. Ir. H. Darmawan, M.P
NIP. 19670202 199803 1 002

Ketua Jurusan,

Salman, S.Pi., M.Si
NIP. 19681231 199512 1 001

Tanggal Lulus : Pangkep, 28 agustus 2018

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul : Tata Cara Penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB), dan surat tanda bukti laporan kedatangan kapal (STBLKK) Oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Sulawesi Utara.

Nama : Rahmawati

Nim : 1522020185

Program Studi : Penangkapan Ikan

Jurusan : Penangkapan Ikan

Menyetujui,
Tim Penguji :

1. Irawan Alham, ST., M.Si (.....)
2. Syamsul Marlin Amir, ST.,M.Si (.....)
3. Muhammad Aras, S.Pi., M.Si (.....)
4. Erna, S.Pi., M.Si (.....)

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Salman, S.Pi, M.Si
NIP. 19681231 199512 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar diploma disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pangkep, 28 Agustus 2018

Yang menyatakan,

Rahmawati

بسم الله الرحمن الرحيم

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat dukungan dan arahan dari berbagai pihak. Ucapan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua yang telah banyak memberi dorongan dan doa-doa yang tak pernah hentinya untuk memperoleh pendidikan yang terbaik.

Penulis yakin sepenuhnya bahwa dalam tugas akhir ini tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa bantuan dan dukungan semua pihak. Karenanya penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Darmawan, MP selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
2. Bapak Salman, S.Pi., M.Si selaku Ketua Jurusan Penangkapan Ikan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
3. Bapak Irawan Alham, ST., M.Si dan Syamsul Marlin Amir, ST.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Yulian Toni, S.ST.Pi selaku pembembing di syahbandar Bitung Sulawesi Utara, sekaligus pembimbing pada kegiatan praktek.
5. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil selama penyusunan laporan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang bersifat membangun dalam upaya perbaikan ataupun sebagai bahan kajian selanjutnya guna kesempurnaan Tugas Akhir ini, sehingga berguna bagi penulis.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh…

Penulis

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**

ABSTRAK xii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tujuan dan Kegunaan 2

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Defininisi Pelabuhan Perikanan 3

2.2. Fungsi dan Tujuan Pembangunan pelabuhan perikanan…..... 3

2.2.1 Fungsi Pelabuhan Perikanan 3

2.2.2 Tujuan Pembangunan Pelabuhan Perikanan 4

2.3. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan 5

2.3.1 Pelabuhan Perikanan Samudera 5

2.4. Definisi Ke Syahbandaran 6

2.4.1 Tugas dan Wewenang Syahbandar 6

BAB III. METODOLOGI

3.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 8

3.2. Metode Pengambilan Data 8

BAB IV. KEADAAN UMUM

4.1 Keadaan Umum PPS Bitung 9

4.2 Sarana dan prasarana 9
4.3 Struktur Organisasi PPS Bitung 12
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Pengurusan Dokumen Keberangkatan 13
5.1.1Penerbitan SPB .....
5.2.Surat Tanda Bukti Lapor Kedatngan kapal 14
5.3.Struktur Organisasi PPS Bitung 17
5.4.Pengurusan Dokumen Sebelum Berangkat (SPB) 17
BAB VI. PENUTUP
6.1.Kesimpulan 19
6.2.Saran 19
DAFTAR PUSTAKA 20
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar 1. Lokasi Pelabuhan Sanudera (PPS) Bitung 11

Gambar 2. Struktur Organisasi Pelabuhan Samudera (PPS) Bitung..... 12

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran 1. Jenis Dokumen 21

Lampiran 2. Sarana dan Prasarana 25

ABSTRAK

Rahmawati. 1522020185. Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal, Oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung Proponsi Sulawesi Utara. (Dibimbing oleh Irawan Alham dan Syamsul Marlin Amir).

Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusa adminitrasi dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Yang telah di tetapkan pada Pasal 1 Nomor 3 Permen KP 2013.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu mengetahui Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK). Oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung Propinsi Sulawesi Utara.

Pengumpulan data dilakukan Oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (PPS) Propinsi Sulawesi Utara, pada bulan Januari sampai dengan April 2018, di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dengan metode observasi serta interview dengan Staf Kantor.

Berdasarkan Tujuan Penulisan Tugas Akhir ini, Tata Cara pembuatan SPB telah ditetapkan pada Permen KP RI Nomor PM 82 Tahun 2014 antara lain:Surat izin penangkapan ikan (SIPI), Surat izin usaha penangkapan (SIUP), Surat laik operasi (SLO), Tanda bukti pemenuhan kapal dan bukti pembayaran jasa, surat tanda bukti laporan kedatangan dan keberangkatan, bukti pembayaran distribusi, pas besar/pas kecil/tahunan, surat keterangan kecakapan nahkoda, sertifikat kelaikan, buku kesehatan, sertifikat radio kapal, SPB terakhir, surat ukur (dalam negeri/internasional). Tata car pembuatan STBLKK telah di tetapkan pada Nomor 3 Permen KP Tahun 2013 pasal 7 ayat (2) sebagai berikut: sipi, log book, surat laik operasi (SLO), surat ukur (dalam negeri/internasional), sertifikat kelaikan dan pengawakan nakhoda dan anak buah kapal (ABK), masih berlaku, buku kesehatan, surat persetujuan berlayar, buku pelaut.

Kata Kunci ***:*** *Surat Persetuan Berlayar, Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km^2(0,3 juta km^2 perairan territorial, dan 2,8 juta km^2 perairan Nusantara) atau 62% dari luas territorial. Berdasarkan *United National Convention On the Law Of Sea* (UNCLOS) 1982, Indonesia diberi hak berdaulat *(Sovereign right)* memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km^2 yang menyangkut eksploitasi dan pengolahan sumber daya hayati dan non hayati. Batas terluar dari ZEE adalah 200 mil dari garis pantai pada surut rendah atau *low water* (Dahuri, 2004).

Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (PPS) adalah unit pelaksanaan teknis kementerian kelautan dan perikanan dibidang prasarana pelabuhan perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal perikanan tangkap. Dimana pelabuhan Perikanan Samudera Bitung merukan pelabuhan perikanan yang diusahakan karna sebagian sarana dan prasarana yang produktif dan ekonomis dikelolah oleh perum prasarana Perikanan Samudera Bitung.

Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusa adminitrasi

dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Yang telah di tetapkan pada Pasal 1 Nomor 3 Permen KP 2013.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan tugas akhir ini, dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui Tata Cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK).

Sedangkan kegunaan dari penulisan tugas akhir ini yaitu untuk memberikan informasi oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Sulawesi Utara sebagai tempat dimana diterbitkan SPB dan STBLKK.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan /atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (PPS) adalah unit pelaksana teknis kementerian kelautan dan perikanan dibidang prasarana pelabuhan perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Dimana pelabuhan Perikanan SamuderaBitung merupakan pelabuhan perikanan yang diusahakan karena sebagian sarana dan prasarana yang produktif dan ekonomis dikelolah oleh Perum Prasarana Perikanan Samudera Bitung .

2.2 Fungsi dan Tujuan Pembangunan Pelabuhan Perikanan

2.2.1. Fungsi Pelabuhan Perikanan

Fungsi pelabuhan perikanan menurut pasal 41 UU No. 31 tahun 2004, yaitu :

1. Tempat tambat labuh kapal perikanan.
2. Tempat pendaratan ikan.
3. Tempat pemasaran dan distribusi ikan.
4. Tempat pelaksanaan mutu hasil perikanan.

5. Tempat pengumpulan data tangkapan.
6. Tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat perikanan.
7. Tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal.

2.2.2. Tujuan Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Tujuan atau makna yang melekat pada istilah pembangunan semuanya akan selalu menunjuk kepada sesuatu yang positif, artinya setiap pembangunan selalu diharapkan bermanfaat. Namun demikian, pada dasarnya kegiatan pembangunan pelabuhan termaksud pelabuhan perikanan yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan dampak secara fisik yang berupa ancaman terhadap kerusakan ekologi baik berupa kerusakan lahan, biologi, yang telah dilaksanakan terdapat pula dampak sosial maupun ekonomi, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah bertujuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sekaligus menunjang kehidupan ekonomi masyarakat, salah satunya adalah pembangunan pelabuhan seperti yang telah dilakukan dibeberapa wilayah kabupaten. Pembangunan pelabuhan perikanan terutama berfungsi dalam pelayanan jasa dibidang perikanan termaksud docking, pengolahan ikan, sandar kapal dan pengadaan sarana penangkapan ikan (Direktorat Jenderal Perikanan, 1994).

2.3 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Tipe dan kriteria pelabuhan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 16/MEN/2006. Klasifikasi pelabuhan perikanan sebagai berikut :

2.3.1. Pelabuhan Perikanan Samudera (Tipe A)

a) Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan laut lepas
b) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran kolam sekurang-kurangnya 60 GT
c) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m
d) Mampu menampung sekurang-kurangnya 100 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT kapal perikanan sekaligus
e) Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor
f) Terdapat industri perikanan

1. Pelabuhan Perikanan Samudera

Pelabuhan perikanan samudera juga dengan singkatan PPS, adalah pelabuhan perikanan kelas A, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan diwilayah laut teritorial, Zona Ekonomi Ekskulis dan perairan internasional.

2.4 Definisi ke syahbandaran

Syahbandar merupakan pengawal yang bertugas menjaga keselamatan dan keamanan berlayar serta visi pemerintah yang menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Oleh karna itu untuk mendukung kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati maka perlu didirikan fasilitas pendaratan dan pengolahan baik berupa kegiatan administrasi ataupun pengawal kegiatan operasional bidang perikanan di pelabuhan perikanan.

Syahbandara adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan berlayar.

2.4.1 Tugas dan Wewenang Syahbandar

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas Dan wewenang yang telah di tetapkan pada Nomor 3 Permen KP Tahun 2013 Pasal 5 yang meliputi:

a. mengatur kedatangan kapal perikanan
b. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan
c. menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan
d. mengatur keberangkatan kapal perikanan
e. menerbitkan Surat Tanda Bukti Keberangkatan Kapal Perikanan
f. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar

g. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan
h. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut
i. memeriksa *log book* penangkapan ikan
j. mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan
k. mengawasi pemanduan;
l. mengawasi pengisian bahan bakar;
m. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
n. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
o. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan
p. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
q. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan
r. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat

Kegiatan Pelaksanaan Pengambilan Data di lakukan mulai dari 29 Januari – 27 April 2018, bertempat di Syahbandar Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung,Sulawesi Utara.

Sedangkan penyusunan tugas akhir ini dilakukan setelah berada di Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep yang dilakukan selama kurang lebih dua bulan yaitu dari bulan Juli sampai pada bulan Agustus 2018 bertempat di Mandalle, Pangkep.

3.2 Metode Pengambilan Data

Penyusunan laporan tugas akhir ini dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan melalui teknis :

- Interview atau wawancara langsung dengan pembimbing lapangan atau staf kantor.
- Observasi atau pengamatan langsung dengan cara berperan aktif selama kegiatan PKPM berlangsung.
- Dokumentasi berupa foto-foto dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi kajian.
- Data sekunder melalui bahan-bahan literatur.